

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Pembahasan Anggaran RAPBN 2020
Ketua Rapat : **Dr. H. Zainudin Amali, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI.**
Sekretaris Rapat : Danis Maya, SH / Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 23 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI
B. Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP
C. Ketua DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri/Kepala BNPP dan Ketua DKPP RI agenda Pembahasan Anggaran RAPBN 2020, pada Rabu, 11 September 2019, dibuka pada pukul 09.05 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Zainudin Amali, SE, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 sebesar **Rp3.431.294.970.000,- (tiga trilyun empat ratus tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)** untuk ditetapkan sebagai Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp468.199.585.000,-

- b. Program Pengawasan Internal Kemendagri Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : Rp76.737.754.000,-
 - c. Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : Rp245.773.691.000,-
 - d. Program Bina Administrasi Kewilayahan : Rp244.534.546.000,-
 - e. Program Bina Pemerintahan Desa : Rp260.126.498.000,-
 - f. Program Bina Pembangunan Daerah : Rp234.210.165.000,-
 - g. Program Bina Otonomi Daerah : Rp90.017.364.000,-
 - h. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Rp788.412.970.000,-
 - i. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah : Rp80.690.866.000,-
 - j. Program Penelitian dan Pengembangan : Rp56.862.486.000,-
 - k. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri : Rp209.292.675.000,-
 - l. Program Pendidikan Kepamongprajaan : Rp676.436.370.000,-
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Dalam Negeri sebesar **Rp1.414.938.285.000,- (satu trilyun empat ratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tahun 2020 sebesar **Rp245.697.974.000,- (dua ratus empat puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BNPP Tahun 2020, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut :
- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya : Rp186.174.974.000,-
 - b. Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan : Rp59.523.000.000,-
4. Komisi II DPR RI menyetujui jumlah Pagu Anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tahun 2020 sebesar **Rp10.720.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang dianggarkan melalui pagu anggaran Bawaslu tahun 2020, dan usulan tambahan anggaran yang diajukan DKPP sebesar **Rp147.169.784.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar seratus**

enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), serta meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 pada Satker khusus DKPP.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 10.50 WIB.

Jakarta, 11 September 2019
KETUA RAPAT

Dr. H. ZAINUDIN AMALI, M.SI
A-292